

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa pembaharuan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Dampak yang paling dirasakan adalah semakin ketatnya persaingan di berbagai sektor perekonomian. Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada agar mampu berkembang dalam arena persaingan seperti saat ini dan sekaligus menjadikannya sebagai motor penggerak perekonomian daerah di masa depan, maka potensi ekonomi yang ada harus mampu menjadi keunggulan daya saing daerah.

Tantangan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dan pengembangan sektor riil adalah identifikasi dan pemahaman akan potensi ekonomi daerah. Secara makro, potensi ekonomi daerah biasanya juga menjadi salah satu indikator daya saing daerah tersebut. Hal itu karena potensi ekonomi suatu daerah akan ikut membentuk kompleksitas daya saing daerah. Oleh karena itu, dalam kajian ini kita membedakan antara konsep potensi ekonomi daerah dengan konsep daya saing daerah. Konsep potensi ekonomi daerah dipahami sebagai salah satu indikator daya saing daerah. Daya saing daerah sendiri mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sekadar potensi ekonomi, karena dalam konsep daya saing daerah juga termasuk aspek kelembagaan, iklim sosial, iklim politik, kebijakan pemerintah, manajemen dan sebagainya.

Potensi ekonomi suatu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena masing-masing daerah mempunyai ciri-ciri khas dan karakteristik yang menempel sesuai dengan sumberdaya manusia, struktur alam, dan letak

geografisnya. Namun potensi ekonomi daerah tersebut merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi, industri, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar bagi produk-produk industri, pertanian dan jasa. Potensi ekonomi suatu daerah juga akan menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kemampuannya dalam penyerapan investasi, tenaga kerja, barang, jasa, dan tabungan.

Selain potensi yang menyangkut kinerja sektor perekonomian, potensi ekonomi suatu daerah juga dapat diukur berdasarkan infrastruktur dan sumberdaya alam yang ada di daerah tersebut. Indikator ini menandai ketersediaan modal fisik berupa infrastruktur, baik mengenai kuantitas dan kualitasnya dalam mendukung perekonomian daerah dan modal alamiah, serta kondisi geografis maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang juga akan mendorong aktivitas perekonomian daerah. Demikian juga teknologi informasi yang maju juga merupakan infrastruktur yang akan mendukung aktivitas bisnis di daerah.

Selain itu, untuk mengukur potensi ekonomi suatu daerah biasanya juga menggunakan indikator ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan sumberdaya manusia yang ada di daerah tersebut. Indikator Iptek digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam penerapan Iptek dalam berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan nilai tambah. Sebab, keunggulan kompetitif daerah dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.

Indikator sumberdaya manusia juga merupakan potensi ekonomi suatu daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia yang ada di daerah tersebut. Tersedianya angkatan kerja

yang besar dan berkualitas akan meningkatkan potensi ekonomi daerah bersangkutan. Demikian juga dengan adanya kualitas hidup masyarakat yang tinggi di suatu daerah juga akan menjadi indikator potensi ekonomi daerah tersebut.

Indikator potensi ekonomi suatu daerah yang diukur berdasarkan pertumbuhan sektor perekonomian, biasanya dibagi ke dalam sembilan sektor yang terdapat dalam PDRB. Sembilan sektor tersebut adalah (1) sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan; (2) sektor pertambangan dan penggalian; (3) sektor industri pengolahan; (4) sektor listrik, gas dan air bersih; (5) sektor bangunan; (6) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (7) sektor pengangkutan dan komunikasi; (8) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (9) sektor jasa-jasa.

Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah berdasarkan sektor maka dihitung bagaimana dan seberapa besar sumbangan masing-masing sektor tersebut terhadap PDRB dan kemampuan masing-masing sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Sektor yang mampu memberikan sumbangan terbesar dan sekaligus juga sebagai sektor yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja tertinggi, akan menjadi potensi ekonomi unggulan (ekonomi basis) daerah tersebut.

Pertumbuhan masing-masing sektor untuk tingkat provinsi tersebut juga menunjukkan adanya pertumbuhan untuk tingkat kabupaten/kota. Hanya saja analisis pertumbuhan berdasarkan sektor perekonomian itu belum mampu menunjukkan potensi ekonomi secara lebih spesifik yang ada pada suatu daerah. Karena, analisis tentang potensi ekonomi berdasarkan pertumbuhan sektor perekonomian tersebut biasanya baru menghasilkan sektor dan sub

sektor yang menjadi ekonomi basis atau unggulan di suatu daerah. Jika dilakukan analisis berdasarkan data *time series* yang cukup panjang, sebenarnya dapat diperoleh sektor atau sub sektor yang benar-benar menjadi ekonomi basis (unggulan) suatu daerah, namun hal itu pun belum menunjukkan bidang usaha dan jenis produk yang menjadi potensi ekonomi daerah itu.

Dari sisi lain, analisisnya juga harus diturunkan ke tingkat bidang usaha dan jenis produk yang dihasilkan oleh sektor atau sub sektor usaha di daerah. Sehingga untuk sektor pertanian misalnya, akan diperoleh secara jelas tentang potensi ekonomi berdasarkan bidang usaha pertanian dan jenis produk pertanian yang menjadi unggulan dan layak dikembangkan lebih lanjut di daerah. Demikian juga halnya untuk sektor industri, perdagangan dan jasa, akan diketahui bidang usaha industri apa saja dan jenis produk industri apa saja yang menjadi potensi ekonomi di daerah itu. Sehingga pada akhirnya akan diketahui potensi bidang usaha dan jenis produk industri apa saja yang layak dikembangkan di daerah tersebut. Dengan demikian maka kebijakan dan program pembangunan yang akan diterapkan dan dikembangkan di daerah dapat lebih aplikatif dan tepat sasaran.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam hal ini, yakni (a) konsep basis ekonomi daerah; (b) konsep basis sumberdaya; (c) konsep spesialisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Konsep Basis Ekonomi Daerah

Konsep basis ekonomi daerah memandang bahwa suatu daerah merupakan sebuah sistem sosial-ekonomi yang terpadu. Kemampuan suatu daerah untuk mengekspor produknya ke luar daerah (luar negeri) akan memicu tumbuhnya efek penggandaan (*multiplier effect*) di daerah itu sendiri.

Dalam hal ini Blakely (1994); teori basis ekonomi ini menganggap bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang-barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Model ekonomi basis juga menekankan pendekatan sektoral terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah. Pendekatan tersebut memusatkan perhatiannya terhadap transaksi dalam sistem perekonomian suatu daerah yang harus dimaksimalkan oleh perekonomian daerah melalui keterkaitan kelembagaan internal antara sektor publik dengan sektor swasta.

Menurut teori basis ekonomi, struktur perekonomian suatu daerah akan terdiri atas dua sektor, yaitu: *pertama*, sektor basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Sektor ini sekaligus menunjukkan bahwa daerah secara tak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain dan ini berarti bahwa sektor tersebut perlu dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. *Kedua*, sektor non-basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang hanya ditujukan untuk melayani pasar dalam daerah itu sendiri.

Richardson (1973) menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah adalah fungsi dari penduduk dan tingkat pendapatan daerah belakangnya; sedangkan laju tingkat pertumbuhan tergantung pada laju tingkat permintaan dari daerah belakang atas barang dan jasa atau pelayanan di daerah perkotaan. Teori lain yang menjelaskan tentang perkembangan daerah adalah

teori sektor basis ekspor (*export base theory*). Teori ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana suatu daerah (kota) tumbuh, dan kemudian mampu mendukung dan mempertahankan pertumbuhan daerahnya. Teori ini dikembangkan oleh banyak ahli, seperti Tiebout (1956) dan Pfouts (1960). Menurut teori ini, ekonomi perkotaan terdiri atas aktifitas basis dan non basis. Aktifitas basis menghasilkan barang dan jasa untuk diekspor. Aktifitas non basis merupakan aktifitas yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi secara lokal. Aktifitas basis merupakan penentu dari pertumbuhan daerah atau perkotaan. Peningkatan dalam aktifitas basis akan mengakibatkan pertumbuhan pendapatan, lapangan kerja dan produksi. Sedangkan penurunan aktifitas basis akan mengakibatkan penurunan total aktifitas ekonomi dan lapangan kerja. Jadi pertumbuhan dari satu daerah perkotaan tergantung pada pertumbuhan aktifitas basisnya. Manfaat utama dari konsep basis ini adalah pada sifatnya yang simpel sehingga merupakan teknik yang berguna bagi analisis pendahuluan dan prediksi.

Menurut Zadjudi (1986) teori basis dan non basis merupakan pengembangan dari teori perdagangan (*Comparative advantage*) dari Ricardo dan J.S. Mills, teori-teori lokasi dari Ohlin, Losch dan Isard yang digabungkan dengan teori perkembangan masyarakat (tradisional versus perkotaan) dan Hoyt. Teori tersebut menyebutkan daerah basis adalah daerah yang sudah berswasembada dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan disamping itu telah dapat pula mengirim barang, jasa-jasa, modal maupun tenaga ahli ke daerah lain, sehingga daerah basis sering disebut daerah surplus. Sebaliknya daerah yang belum dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan masih mendatangkan barang, jasa-jasa, modal maupun tenaga ahli disebut daerah

bukan basis atau sering disebut sebagai daerah minus, dimana kebutuhan daerah minus tersebut disubsidi oleh pemerintah.

2) Konsep Basis Sumberdaya

Teori ini dikemukakan oleh Harvey Perloff dan Lowdon Wingo Jr. tahun 1964 (Sukirno, 1976). Pada dasarnya, teori basis sumber daya (*resource base theory*) merupakan perluasan dari teori basis ekonomi dan/atau teori basis ekspor.

Dalam analisisnya, teori ini disamping mengakui peranan yang sangat besar dari perkembangan sektor ekspor suatu daerah dalam pembangunan daerah, baik dalam menciptakan pendapatan di sektor tersebut maupun dalam menciptakan efek penggandaan pada perekonomian daerah secara menyeluruh, teori ini juga menekankan analisisnya dalam dua aspek, yaitu:

- a) Pentingnya peranan kekayaan alam suatu daerah dalam pembangunan daerah tersebut dalam berbagai tingkat pembangunan ekonominya.
- b) Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya efek pengganda dari sektor ekspor secara menyeluruh pada perekonomian daerah.

Teori basis sumberdaya juga menganalisis mekanisme dari pertumbuhan suatu daerah. Menurut teori ini, pembangunan daerah pada mulanya timbul karena akibat adanya kesanggupan suatu daerah untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh perekonomian nasional dan mengeskpornya dengan harga dan kualitas yang bersaing dengan barang yang

sama atau sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain. Kesanggupan mengespor tersebut, selanjutnya akan menciptakan pendapatan untuk daerah itu sendiri berdasarkan karakteristik yang melekat pada perekonomian daerah serta struktur sosial daerah tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan berkembangnya pasar daerah dan kegiatan ekonomi mampu menyediakan keperluan daerah, maka akan tercipta keadaan yang mendorong pertumbuhan daerah tangguh secara otomatis (*self-reinforcing*) dan berkembang secara otomatis (*self-sustaining*). Akibatnya, faktor-faktor dari dalam daerah itu menjadi bertambah penting peranannya dalam pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, dengan adanya pertumbuhan yang berkembang secara otomatis, maka terjadilah pergeseran dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah—dari didominasi sektor ekspor menjadi lebih dipengaruhi oleh efisiensi organisasi produksi di daerah tersebut (Sukirno, 1976).

3). Konsep Spesialisasi

Konsep spesialisasi dalam pembangunan regional merupakan suatu konsep pembangunan yang menunjukkan suatu tingkat spesialisasi relatif suatu sektor atau suatu daerah terhadap sektor atau daerah lain. Guna memberikan gambaran yang ideal mengenai tingkat spesialisasi suatu sektor perekonomian, maka dibutuhkan suatu alat analisis yang memadai. Salah satu alat analisis yang dimaksud adalah dengan menggunakan teknik analisis *location quation* (LQ).

Teknik LQ merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi relatif suatu daerah dalam kategori industri atau sektor

(Bendavid-Val,1991). Selain itu pula teknik LQ ini juga merupakan suatu indikator sederhana yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain. Nilai LQ di suatu sektor pembangunan daerah lebih besar dari satu maka sektor yang bersangkutan merupakan sektor kuat, sehingga daerah tersebut secara potensial merupakan pengeksport produk dari sektor tersebut ke daerah lainnya. Sebaliknya bila nilai LQ kurang dari satu, maka daerah tersebut merupakan pengimpor produk sektor tertentu (Azis, 1994). Dalam aplikasinya teknik LQ dapat digunakan untuk menganalisis potensi perekonomian dari sisi pendapatan domestik dan dari sisi kesempatan kerja di suatu daerah